

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Muadz Rizki Muzakki

NIM. 12030111130040

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muadz Rizki Muzakki

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130040

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013).**

Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.

Semarang, 03 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.)

NIP. 196208131990011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Muadz Rizki Muzakki

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130040

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013).**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Juni 2015

Tim Penguji:

1. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. (.....)
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muadz Rizki Muzakki, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013)*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang dtelah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 03 Juni 2015
Yang membuat pernyataan,

Muadz Rizki Muzakki
NIM. 12030111130040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup bukan sekedar tentang dirimu sendiri”

Fight for Better Future

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Abi, Umi Anni, Alm. Umi Sri, Alm. Mbah kung,
Mbak uti, Afi, Muh, Alm. Syifa, Zaid, Najmah dan Hapsah
yang sejak lama menjadi inspirasi
dan alasan untuk berjuang.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate social responsibility (CSR) and capital intensity to tax avoidance. The purpose of this study is to provide empirically evidence about the effect of CSR and capital intensity to tax avoidance. The independent variables of this study are CSR and capital intensity, the dependent variable is tax avoidance, and control variables are size and profitability. CSR measured by CSR disclosure with GRI G3.1 as the indicator. Capital intensity measured by total fixed asset divide by total asset. Size measured by logarithm of total asset. Profitability measured by Return on Asset (ROA). Tax avoidance measured by effective tax rates (ETR).

The population in this study are 446 manufacturing companies which listed on Indonesian Stock Exchange in the period of 2011-2013. Sample were selected by purposive random sampling method and finally obtained 211 manufacturing companies that fulfill the criteria. Data were analyzed using multiple regression analysis model.

The result show that CSR and capital intensity significant negatively influence tax avoidance. Based on the result, conclude that tax avoidance decision is influenced by its attitude about CSR and capital intensity.

Keywords : *corporate social responsibility (CSR), capital intensity, tax avoidance, effective tax rates (ETR), size, profitability, ROA.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Variabel independen penelitian ini adalah CSR dan *capital intensity*, variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dan variabel kontrol *size* dan profitabilitas. Variabel independen CSR diukur dengan *CSR disclosure* dengan indikator GRI G3.1. Variabel independen *capital intensity* diukur menggunakan intensitas aset tetap. Variabel kontrol *size* diukur menggunakan logaritma total aset, dan profitabilitas diukur dengan ROA. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan *effective tax rates* (ETR).

Populasi penelitian ini adalah 446 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive random sampling* dengan kriteria tertentu, dan diperoleh sebanyak 211 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel CSR dan *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berarti penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR dan *capital intensity*.

Kata kunci : *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, penghindaran pajak, *effective tax rates* (ETR), *size*, profitabilitas, ROA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013)” dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah membagi ilmu dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Adityawarman, S.E., M. Acc., Ak. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. dan Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. selaku dosen penguji.
6. Seluruh dosen dan segenap staff yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Abi Aman dan Umi Anni yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar putra-putrinya selalu sukses dan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang.

8. Alm. Umi Sri Lestari, yang telah melahirkan dan mendidik penulis dengan ikhlas.
9. Kakak dan adik-adikku (Mufti, Afi, Muh, Alm. Syifa, Zaid, Najmah, Hapsah) tersayang yang selalu menjadi motivasi tambahan bagi penulis.
10. Keluarga besar Alm. Mbah Wahudi, Simbok dan Mbah Bantul yang selalu mendukung dan mendidik penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Ai, Didik, Angga, Yandhi, Akbar, Randi, Indra, Ryan, Adam, Ripay, Rully, Calvin, Azrul, Benny, dan teman sepermainan masa SMA lain yang masih tetap menjaga persahabatan walaupun terpisah di kota yang berbeda-beda.
12. Galas Dipo 11: Asnan, Rofiq, Fajar, Eko, Husni, Risha, Rindu, Zaqqia, Faisal, Dhienda, Giveth, Hawa. Terimakasih telah mau saling bantu berjuang bersama-sama di Kota Semarang.
13. Cintya Wulandari, terima kasih telah selalu menjadi orang pertama dan terakhir yang ada untuk penulis.
14. Semua sanak saudara dan kerabat dekat yang membantu penulis dari segi apapun selama menempuh kuliah di kota semarang.
15. Pak Sri squad: Reja Ariel, Danand, Akmal, Reza Hanung, Alvine, Niko, Danu Best, Rainer, Jollifi yang telah membantu dalam segala aspek kehidupan mahasiswa.
16. ART Residence dkk: Andrie, Seny, Osa, Sari, Hadi, Tian, Aziz.
17. Teman-teman GIA, Akuntansi 2011 : Achmad Reza, Akmal, Alex, Alfian, Alvin, Angge, Alif, Bahrul, Brahma Bamboo, Cintya Wulandari, Danu Besfren, Desspa, Faezal Ical, Fafa, Fahmi F, Faiz, Fajar, Feby Pepi, Fika, Galuh, Habib, Hanif Sulam, Hanif Pati, Hasna, Hermas, Ikhsan Reza, Jollify, Kezia, Gati, Danand, Nanang, Niko, Novita, Nugroho O-O, Nuristri iis, Occi, Bani, Pitri, Bos Adit, Wempy, Omesh, Bayu, Satrio, Rainer, Reza Aul, Reza Codot, Roy, Risha, Rusdan, Widya Nyunyu, dan gembel lainnya. Terima kasih telah memberikan pengalaman bermain bersama yang menyenangkan dan menjadi teman yang baik di kampus.

18. Semua teman-teman Akuntansi angkatan 2011 yang telah berjuang kuliah bersama.
19. Tim KKN Desa Banjarsari, Bejen, Temanggung (Abid, Buyung, Eko, Rico, Galuh, Icha, Alfa, Boneta)
20. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi maupun dalam segala hal yang tidak bias disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima Kasih.

Semarang, 03 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	11
2.1.1 Teori Legitimasi	11
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	12
2.1.3 Teori Agensi.....	14
2.2 Penghindaran Pajak	15
2.3 Peraturan Perpajakan di Indonesia	16
2.3.1 Rekonsiliasi Fiskal.....	17
2.4 Corporate Social Responsibility.....	19
2.4.1 <i>CSR Disclosure</i>	20
2.5 Capital Intensity	21

2.6	Variabel Kontrol.....	22
2.6.1	<i>Size</i> (Ukuran perusahaan).....	22
2.6.2	Profitabilitas	23
2.7	Penelitian Terdahulu.....	23
2.8	Kerangka Pemikiran	30
2.9	Perumusan Hipotesis	31
2.9.1	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	31
2.9.2	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	34
BAB III		36
METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	36
3.1.1	Variabel Dependen.....	36
3.1.2	Variabel Independen	36
3.1.3	Variabel Kontrol.....	39
3.2	Populasi dan Sampel	40
3.3	Jenis dan Sumber Data	41
3.4	Metode Pengumpulan Data	42
3.5	Metode Analisis.....	42
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	42
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.3	Pengujian hipotesis	45
BAB IV		48
HASIL DAN ANALISIS		48
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2	Analisis Data	50
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	50
4.2.2	Analisis Regresi Berganda	53
4.2.3	Uji Aumsi Klasik	53
4.2.5	Uji Hipotesis	57

4.3	Interpretasi Hasil	61
4.3.1	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Penghindaran Pajak.....	62
4.3.2	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	63
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Keterbatasan Penelitian	67
5.3	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Penyusutan pajak.....	19
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Indikator Index GRI G.3.1 yang Digunakan Penelitian.....	38
Tabel 4.1	Perincian Sampel.....	49
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.3	Persentase Pengungkapan CSR.....	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas dengan <i>Tolerance</i> dan VIF.....	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Koefisien.....	54
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>LM Test</i>	55
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser.....	56
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas dengan Uji K-S.....	57
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik F.....	59
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik T	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	31
------------	-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Sampel Perusahaan.....	72
Lampiran B	Indikator CSR GRI G.3.1.....	78
Lampiran C	Hasil Uji Statistik.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Freise *et al.* (2008) (dalam Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Upaya peningkatan

tax ratio ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan *tax ratio* adalah dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan usahanya. Salah satu kebijakan perpajakan yang mendorong pengusaha dalam negeri untuk giat mengembangkan usahanya adalah kebijakan tentang insentif penurunan pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menjelaskan bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya dengan insentif penurunan tarif pajak, pemerintah juga melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang berisi tentang penyederhanaan perhitungan pajak dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dikenakan tarif pajak sebesar 1%.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan menguntungkan bagi wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan dapat meningkat, dan juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Sehingga diharapkan berakibat pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari pemungutan pajak.

Namun upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis. Pajak yang dibayar oleh perusahaan bisnis didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Beberapa peneliti seperti Freedman (2003), Slemrod (2004), Landolf (2006) berpendapat bahwa kebijakan penghindaran pajak perusahaan mungkin berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu

tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006).

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan dengan banyak cara, salah satunya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012), dan menurut Holme dan Watts (2006) CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

(1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang *mix* atau berbeda-beda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sementara Carroll dan Joulfaian (2005), Preuss (2010), dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah,

hal ini menunjukkan hubungan negatif rasio intensitas modal terhadap tingkat pajak efektif.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Lanis dan Richardson (2012) dengan menjadikan variabel kontrol *capital intensity* atau intensitas modal sebagai variabel independen. *Capital intensity* dijadikan sebagai variabel independen dikarenakan menurut Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Sementara aset tetap akan mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan bagi perusahaan, yang bisa menjadi salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat pajak efektif pada sebuah perusahaan. Penelitian ini juga hanya menggunakan 1 model ETR sebagai proksi penghindaran pajak, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan (GAAP ETR). Menurut Huseynov dan Klamm (2012) model ETR ini mampu menangkap efek dari pendapatan akuntansi keuangan. GAAP ETR juga lebih baik dalam mengukur penghindaran pajak jangka panjang dibanding dengan *cash* ETR (Dyrenge *et al.*, 2008). Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh antara CSR dan *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak.

Terdapat beberapa penelitian tentang kaitan CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu penelitian tentang CSR dan *capital intensity* di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Yoehana (2013),

penelitian tersebut menggunakan indikator pengungkapan CSR yang dibuat oleh Sembiring pada tahun 2005. Sementara penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan CSR terbaru yang dikeluarkan oleh GRI tahun 2011, sehingga diharapkan indikator pengungkapan CSR dalam penelitian ini lebih relevan dan lebih menggambarkan keadaan pada saat ini. Kerangka pelaporan GRI mengandung isi yang bersifat umum dan sektor yang spesifik yang dapat di aplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja berkelanjutan sebuah organisasi (Sudana dan Arlindania, 2011).

Menurut Lanis dan Richardson (2012) CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Sementara itu pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada Negara. Oleh Karena itu tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Negara Indonesia, namun disisi lain pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang masih *mix*, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini pajak merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan definisi pajak dari sudut pandang perusahaan

sebagai wajib pajak inilah yang membuat banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang legal maupun ilegal agar beban pajak yang mengurangi laba tidak besar, sehingga laba perusahaan lebih besar. Penghindaran pajak merupakan sebuah aktivitas yang tidak bertanggung jawab sosial, hal ini bertentangan dengan aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada semua stakeholdernya. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah tersebut, maka dapat ditegaskan dengan pertanyaan penelitian, berupa:

Pertanyaan penelitian 1: Apakah terdapat pengaruh antara CSR terhadap penghindaran pajak?

Sementara itu kegiatan penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pajak efektif atau *effective tax rates* (ETR) adalah *capital intensity*. Hal ini dikarenakan beban depresiasi yang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Sehingga perusahaan dengan rasio *capital intensity* yang tinggi akan memiliki *Effective Tax Rates* (ETR) yang rendah. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah tersebut, maka dapat ditegaskan dengan pertanyaan penelitian, berupa:

Pertanyaan penelitian 2: Apakah terdapat pengaruh antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh CSR terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan CSR dan *capital intensity* dengan penghindaran pajak yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak.
3. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan pajak di Indonesia.
4. Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan pada perusahaan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II Telaah Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pemaparan variabel-variabel penelitian serta pengukurannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini berisi tentang pemaparan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil analisis.

Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika terdapat ketidaksielarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Kelangsungan hidup sebuah perusahaan juga bergantung pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sosial disekitar tempat perusahaan beroperasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa sebuah organisasi harus berusaha meyakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan-batasan dan norma sosial yang ada.

Ghozali dan Chariri (2007) juga menjelaskan bahwa organisasi berusaha menciptakan keadaan dimana sebuah sistem nilai perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar agar sebuah organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sebuah perusahaan atau organisasi juga dapat mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau yang sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui pemerintah. Perusahaan bisa bertanggungjawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013).

Menurut Landolf (2006) penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. Oleh karena itu penghindaran pajak tidak sesuai dengan prinsip CSR yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

2.1.2 Teori Stakeholder

Donaldson dan Preston (1995) dalam *stakeholder theory* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua stakeholder organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007). Sehingga sebuah perusahaan sangat

bergantung pada dukungan stakeholdernya. Gray *et al.* (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful* stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.

Dalam teori stakeholder dinyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham saja, melainkan juga bertanggung jawab kepada semua stakeholder lain yang memiliki andil bagi perusahaan dan juga yang terkena dampak dari operasi perusahaan.

Corporate social responsibility merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua stakeholdernya. Oleh karena itu CSR merupakan hal yang penting bagi perusahaan.

Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak.

Menurut Landolf (2006) penghindaran pajak merupakan hal yang tidak bertanggung jawab sosial. Hal ini tidak sesuai dengan teori stakeholder yang menyebutkan bahwa perusahaan selalu mengusahakan dukungan dari stakeholdernya.

2.1.3 Teori Agensi

Dalam teori agensi dinyatakan bahwa adanya kontrak antara pihak pemberi wewenang (*principal*) kepada pihak yang mendapatkan wewenang (agen) untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pihak *principal*, dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam sebuah perusahaan, teori agensi ini terimplementasi dalam hubungan antara pemilik saham dengan manajer. Pemilik saham (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (agen) untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja dan *return* yang baik bagi pemilik saham.

Namun seperti yang disebutkan oleh Anthony dan Govindarajan (2009) bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu teori agensi ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemilik saham selaku *principal* dengan manajer selaku agen dalam perusahaan. Manajer bertugas memberikan laporan kinerja perusahaan kepada pemilik saham. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, karena laporan kinerja tersebut berkaitan juga dengan kinerja para manajer perusahaan. Oleh karena itu dapat terjadi *asymmetry information* antara manajer dan pemilik saham.

2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemerintah. Dana hasil pembayaran pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013). Menurut Landolf (2006) penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan umum.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR). *Effective tax rates* adalah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2012) ETR digunakan sebagai proksi penghindaran pajak karena beberapa alasan, diantaranya adalah ETR menjadi proksi yang sering digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Mills *et al.* (1998), Phillips (2003), Rego (2003), dan Dyreng *et al.* (2008). Rendahnya ETR juga menjadi indikator pertanda dari aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan.

2.3 Peraturan Perpajakan di Indonesia

Adriani (dalam Waluyo, 2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang gunanya untuk penyelenggaraan tugas Negara. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak di Indonesia. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 salah satu subjek pajak adalah badan. Dalam UU No.28 tahun 2007, Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak penghasilan di Indonesia sendiri diatur didalam UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari UU No.17 Tahun 2000, UU No.7 Tahun 1991 dan UU No.7 Tahun 1983. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari pajak, pemerintah memberikan insentif pajak agar pengusaha dalam negeri giat dalam mengembangkan usahanya. Insentif pajak ini tertuang dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b yang menjelaskan bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Terhitung sejak 1 Juli 2013 pemerintah juga memberikan kemudahan perhitungan pajak bagi badan dan wajib pajak pribadi melalui Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Bagi wajib pajak badan dan pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, dikenakan pajak yang bersifat final. Besarnya tarif pajak final adalah 1% dari peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak.

Dalam UU No.36 Tahun 2008 tidak dijelaskan secara khusus tentang CSR, namun terdapat biaya-biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak (*deductible*) yang berkaitan dengan isu CSR, diantaranya adalah beban pengolahan limbah, sumbangan bencana nasional, biaya magang, beasiswa.

2.3.1 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal) (Resmi, 2011). Laporan keuangan komersial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dari sektor swasta, sementara laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Terjadinya perbedaan laba menurut komersial dan fiskal dikarenakan dasar penyusunannya yang berbeda, dimana laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),

sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Undang Undang perpajakan yaitu UU No.36 Tahun 2008. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan komersial, namun juga membutuhkan laporan keuangan fiskal untuk perhitungan pajak, oleh karena itu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan.

Salah satu perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah pada metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap laporan keuangan komersial diatur dalam PSAK 16, yang memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus (*straight line method*), jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), saldo menurun (*declining balanced method*), saldo menurun ganda (*double declining method*), dan lain-lain. PSAK 16 juga menjelaskan bahwa manajemen perusahaan dapat menaksir sendiri umur ekonomis dan masa manfaat suatu aset. Sementara metode penyusutan aset tetap laporan keuangan fiskal diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang dijelaskan pada pasal 11, dimana hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus, dan saldo menurun untuk harta berwujud non bangunan. Dalam laporan keuangan fiskal umur ekonomis suatu aset diatur berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan Pajak

Kelompok Harta Bukan Bangunan	Masa Manfaat	Tarif Metode Garis Lurus	Tarif Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Kelompok Harta Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengoreksi laba komersial menjadi laba fiskal, yaitu dengan menghapus beban-beban dan penghasilan yang tidak termasuk dalam laporan keuangan fiskal, dan memasukan beban-beban dan penghasilan yang termasuk kedalam laporan keuangan fiskal. Jika koreksi menambah laba fiskal maka dinamakan koreksi positif, jika mengurangi laba fiskal dinamakan koreksi negatif.

2.4 Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Holme dan Watts, 2006).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para stakeholdernya untuk menjalankan operasional perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua stakeholdernya.

2.4.1 CSR Disclosure

CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu pengungkapan sosial atau pengungkapan CSR memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat.

Pengungkapan CSR pada dasarnya adalah sebuah bentuk laporan tindakan-tindakan sosial perusahaan dan tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Menurut O'Donovan (2002) pengungkapan CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan seperti untuk menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, untuk membentuk *image* dan reputasi perusahaan yang baik, untuk menghindari tekanan dari kelompok tertentu, dan juga untuk menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan.

Sejauh ini, belum ada standar khusus yang mengatur pengungkapan CSR (*CSR disclosure*) di Indonesia. Sehingga perusahaan diperbolehkan menyusun sendiri format pelaporan tanggungjawab sosialnya.

Pada umumnya perusahaan menggunakan standar *sustainability report* yang dibuat oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR. Dalam standar *sustainability report* yang dikembangkan oleh GRI terdapat 6 dimensi pelaporan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu:

1. Ekonomi.
2. Lingkungan.
3. Praktek tenaga kerja.
4. Hak asasi manusia.
5. Masyarakat.
6. Tanggung jawab Produk.

Terdapat 83 indikator yang tersebar didalam 6 dimensi tersebut.

Kerangka pelaporan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan.

2.5 Capital Intensity

Capital intensity ratio dapat di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah

dan Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar ETR perusahaan rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Gupta dan Newberry (1997) mengungkapkan bukti bahwa semakin besar proporsi aset tetap perusahaan, semakin rendah ETR perusahaan. Lebih lanjut Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak.

2.6 Variabel Kontrol

2.6.1 Size (Ukuran perusahaan)

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) *size* atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. *Size* atau ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *effective tax rates* (ETR) sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR mereka.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi beban pajak mereka.

2.6.2 Profitabilitas

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan.

Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang langsung dan signifikan terhadap ETR. Tingkat pendapatan atau profitabilitas berbanding lurus dengan ETR. Sehingga Semakin tinggi profitabilitas perusahaan seharusnya semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah penghindaran pajak telah banyak dilakukan, begitu pula dengan penelitian tentang masalah *corporate social responsibility*. Namun penelitian yang menghubungkan antara CSR dengan penghindaran pajak belum banyak dilakukan, dan memiliki hasil yang masih berbeda-beda. Begitu pula penelitian yang menghubungkan *capital intensity* dengan penghindaran

pajak, belum banyak dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut adalah uraian beberapa penelitian mengenai penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007) menggunakan variabel dependen berupa *effective tax rates* (ETR). Sementara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan intensitas penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Sementara untuk variabel intensitas persediaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *effective tax rates* (ETR).

Salah satu penelitian lain yang menghubungkan antara intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di Malaysia menggunakan *effective tax rates* (ETR) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *return on asset* (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak sebagai variabel independen. Penelitian ini menemukan bahwa ROA, hutang perusahaan, dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Sementara intensitas persediaan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *effective tax rates* (ETR). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Lanis

dan Richardson (2007) yang menemukan adanya pengaruh negatif antara intensitas aset tetap terhadap *effective tax rates*.

Pada tahun 2012 Lanis dan Richardson kembali melakukan penelitian yang kali ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang diprosikan menggunakan *effective tax rates*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian lain yang menghubungkan *corporate social responsibility* dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan Watson (2012) dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel independen dan *effective tax rates* sebagai variabel dependen. Penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif antara CSR dengan *effective tax rates* (ETR), yang berarti perusahaan yang melakukan CSR memiliki ETR yang rendah. ETR yang rendah menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain yang menghubungkan antara CSR dengan agresivitas pajak adalah penelitian yang dilakukan kembali oleh Lanis dan Richardson (2013) dengan tujuan untuk menguji teori legitimasi. Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak dengan proksi ETR sebagai variabel independen, dan CSR sebagai variabel dependen. Penelitian ini menguji teori legitimasi yang digunakan

Lanis dan Richardson dalam penelitian mereka sebelumnya yang menggunakan teori legitimasi sebagai landasan teori penelitian mereka. Penelitian ini menemukan bahwa agresivitas pajak berhubungan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, maka semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini memberikan hasil yang mendukung teori legitimasi.

Salah satu penelitian di Indonesia yang menghubungkan *capital intensity* dengan ETR adalah yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013). Penelitian ini menggunakan ETR sebagai alat ukur variabel dependen manajemen pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah intensitas aset tetap dan intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Tingkat hutang dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap ETR, hal ini bertentangan dengan penelitian Lanis dan Richardson (2007), dan Noor *et al.* (2010) yang menemukan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap ETR.

Penelitian Yoehana (2013) menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan CSR sebagai variabel independen, dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-

2011. Hasil dari penelitian ini adalah CSR berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas atau penghindaran pajak.

Ardyansah dan Zulaikha pada tahun 2014 juga melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *effective tax rates* (ETR). Penelitian ini menguji pengaruh variabel *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen sebagai variabel independen penelitian, terhadap *effective tax rates* (ETR) sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR, *capital intensity* dan *profitability* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR.

Octaviana pada tahun 2014 mereplika penelitian Lanis dan Richardson (2013) yang menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap CSR, untuk menguji teori legitimasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diprosikan menggunakan *effective tax rates* (ETR). Sementara variabel dependen penelitian ini adalah CSR. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan pertambangan dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan hasil baru yang tidak sejalan dengan hasil penelitian

Lanis dan Richardson (2013) yang menemukan agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap CSR.

Pada tahun 2015 Purwanggono meakukan penelitian dengan mengembagkan penelitian Lanis dan Richardson (2012) tentang Pengaruh CSR dan kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR dan kepemilikan mayoritas, dengan variabel dependen agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Lanis dan Richardson yaitu CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga menemukan kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Richardson dan Lanis (2007)	Variabel Independen: ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan intensitas penelitian dan pengembangan Variabel Dependen: <i>Effective tax rates</i> (ETR).	ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR). intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR).
2.	Noor et al. (2010)	Variabel Independen: ukuran perusahaan, <i>return on asset</i> (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis	ROA, hutang perusahaan, dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR). intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh

		perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak. Variabel Dependen: <i>Effective tax rates</i> (ETR).	positif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR).
3.	Lanis dan Richardson (2012)	Variabel Independen: CSR. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (ETR).	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
4.	Watson (2012)	Variabel Independen: CSR. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	CSR berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Lanis dan Richardson (2013)	Variabel Independen: <i>Tax aggressiveness</i> (ETR). Variabel Dependen: CSR.	<i>Tax aggressiveness</i> berpengaruh positif terhadap CSR.
6.	Darmadi dan Zulaikha (2013)	Variabel Independen: Intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas. Variabel Dependen: Manajemen pajak.	Intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Tingkat hutang dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
7.	Yoehana (2013)	Variabel Independen: CSR. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak.	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

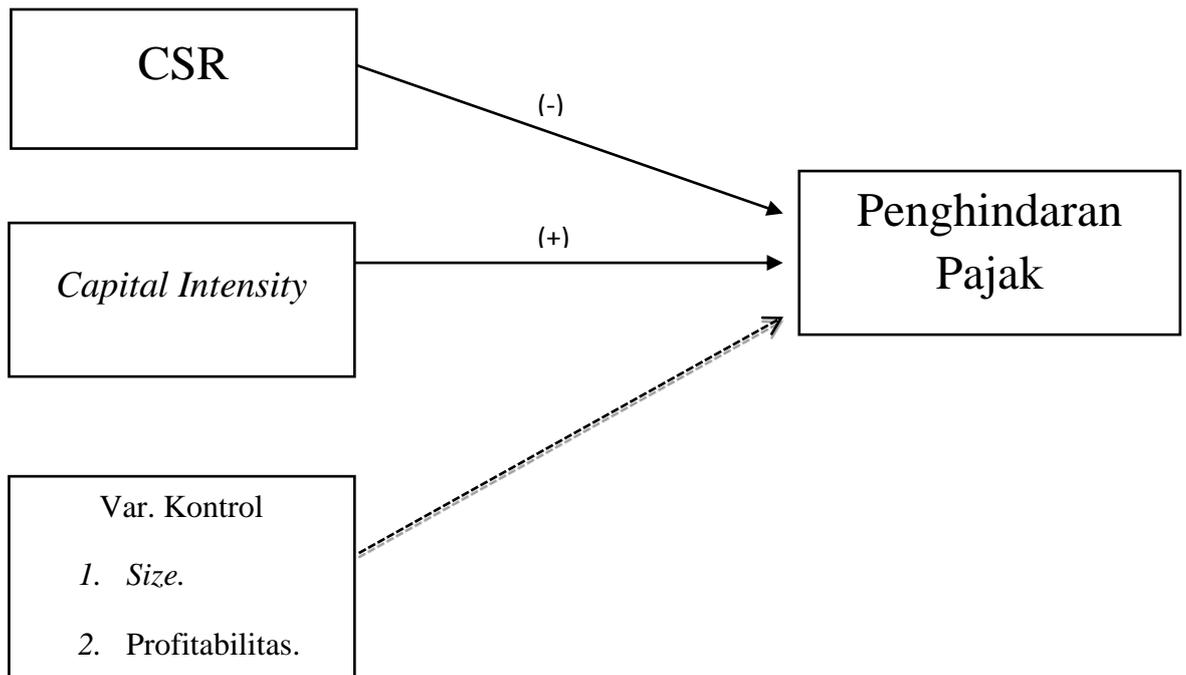
8.	Ardyansah dan Zulaikha (2014)	<p>Variabel Independen: <i>Size, leverage, profitability, capital intensity ratio</i> dan komisaris independen.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rates</i> (ETR)</p>	<p><i>Size</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR.</p> <p>Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR.</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR.</p> <p><i>Profitability</i> dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR.</p>
9.	Ocatviana (2014)	<p>Variabel Independen: Agresivitas Pajak.</p> <p>Variabel Dependen: CSR.</p>	<p>Agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap CSR.</p>
10.	Purwanggono (2015)	<p>Variabel Independen: CSR dan kepemilikan mayoritas.</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak.</p>	<p>CSR dan kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen dan variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* dan *capital intensity*, dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, dengan variabel

kontrol *size* dan profitabilitas. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9 Perumusan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sebagai salah satu subjek pajak. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan

rakyat. Hal ini berarti perusahaan berkontribusi dalam upaya mensejahterakan rakyat. Dowling dan Pfefer (1975) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan selalu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kegiatannya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada untuk mendapatkan legitimasi agar kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan aktivitas penghindaran pajak yang bisa merugikan banyak pihak.

Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, perusahaan juga telah membina hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan semua pihak atau *stakeholder* yang terkena dampak atas kegiatan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemegang sahamnya saja, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada semua stakeholdernya seperti *supplier*, pemerintah, pekerja, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholdernya adalah dengan membina hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan melalui ketaatan

perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Freedman (2003) mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berarti perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya berupa beban pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah untuk membantu pendanaan barang publik didalam masyarakat. Menurut Williams (2007), Erle (2008), dan Hartnett (2008) (dalam Lanis dan Richardson, 2012) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memperburuk reputasinya dimata para stakeholder. Tidak hanya itu, dampak terburuk dari penghindaran pajak adalah akan menghasilkan berhentinya kegiatan operasi perusahaan.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholdernya melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012), Yoehana (2013), dan Purwanggono (2015) menemukan bahwa CSR Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil dari penelitian terdahulu, maka seharusnya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka diharapkan akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran

pajak. Hal ini karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terbentuklah hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.9.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak.

Seperti yang disebutkan oleh Anthony dan Govindarajan (2009) bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (agen). Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak.

Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007), juga Noor *et al.* (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Hal ini berarti *Capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis kedua, yaitu:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). ETR dalam penelitian ini hanya menggunakan model utama yang digunakan Lanis dan Richardson (2012), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Rasio ETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

ETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen

dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR), dan *capital intensity*.

3.1.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio pengungkapan CSR atau CSR *disclosure*. Penelitian ini menggunakan tabel *checklist* dengan indikator pengungkapan CSR yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Indikator pengungkapan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan.

Indikator pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks GRI G.3.1 yang dibuat oleh GRI. Dalam *guidelines* G.3.1 mencakup 6 dimensi pelaporan, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat sosial, dan tanggung jawab produk. Pada setiap dimensi terdapat sejumlah indikator masing-masing yang total keseluruhannya terdapat sejumlah 83 indikator. Namun penelitian ini hanya menggunakan 5 dimensi. Penelitian ini mengeluarkan dimensi ekonomi karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan sosial dan lingkungan, yang mengarah seperti hubungan pekerja atau masyarakat dan juga dampak terhadap lingkungan sekitar. Berikut ini indikator GRI G.3.1 yang digunakan dalam penelitian ini.

Table 3.1
Indikator Index GRI G.3.1 Yang Digunakan Dalam Penelitian

Indikator	Jumlah Item
Lingkungan	30
Tenaga Kerja	15
Hak Asasi Manusia	11
Masyarakat Sosial	10
Tanggung Jawab Produk	9
Total Items	75

Pengukuran pengungkapan CSR ini menggunakan variabel *dummy*. Hal ini dilakukan dengan mencocokkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan tabel *checklist*. Apabila item dalam tabel *checklist* diungkapkan oleh perusahaan maka diberi nilai 1, apabila tidak diungkapkan diberi nilai 0. Kemudian dijumlahkan semua item yang bernilai 1 dari perusahaan, kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh item pada tabel *checklist*. Rumus pengukuran rasio pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum X_i}{n}$$

CSRDi: Pengungkapan CSR perusahaan i.

$\sum X_i$: Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i.

n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR (n=75).

3.1.2.2 *Capital Intensity*

Capital intensity dalam penelitian ini akan diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan atau dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas perusahaan.

3.1.3.1 *Profitabilitas*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Semakin tinggi profitabilitas seharusnya semakin tinggi juga ETR sebuah perusahaan. Profitabilitas diukur menggunakan rasio profitabilitas, yaitu ROA. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.3.2 Ukuran Perusahaan (*size*)

Size atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat berpengaruh secara langsung terhadap ETR. Semakin besar perusahaan maka semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah dari kompleksnya transaksi yang ada untuk meminimalkan ETR mereka. Pengukuran ukuran perusahaan diukur melalui logaritma total aset perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan yang terdapat didalam industri manufaktur adalah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan industri lain, dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan di Indonesia. Dan juga untuk menghindari bias efek industri.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* adalah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif.

Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive random sampling* dalam penelitian ini:

1. Perusahaan tidak memiliki laba sebelum pajak yang rugi atau negatif selama periode 2011-2013, karena akan mengakibatkan ETR yang negatif.
2. Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0-1, karena semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.
3. Perusahaan yang menggunakan satuan Rupiah dalam pelaporan keuangannya.
4. Perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan mengungkapkan aktifitas CSR nya dalam laporan tahunan selama periode penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sementara jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013.

Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau dari website milik Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, serta sumber lain yang relevan seperti dari website perusahaan dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dicatat adalah data yang relevan dengan variabel penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2012). Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digambarkan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai baik atau tidak. Terdapat 4 cara untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2012). Karena model

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Matriks korelasi variabel-variabel independen.

Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,95), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas (Ghozali, 2012).

2. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Cutoff* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2012).

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2012). Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Sementara model regresi yang baik dalah model regresi yang tidak memiliki masalah autokorelasi.

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*) karena jumlah observasi lebih dari 100. *LM Test*

ini memang lebih tepat digunakan terutama bila sampel yang digunakan relatif besar. *LM Test* ini nantinya akan menghasilkan *statistic Breusch-Godfrey*, yang kemudian akan dilakukan pengujian *Breusch-Godfrey* atau BG Test. Dari hasil BG Test, apabila koefisien parameter dari nilai residual (lagres) menunjukkan probabilitas signifikan di bawah 5%, maka terdapat indikasi adanya autokorelasi tingkat satu.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2012). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2012). Apabila

nilai residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil.

Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan melakukan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya, dengan ketentuan jika nilai probabilitasnya $\geq 0,05$ maka residual terdistribusi normal. Sementara jika nilai probabilitasnya $\leq 0,05$ maka residual terdistribusi tidak normal.

3.5.3 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda atau *multiple regression analysis*. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = \alpha + \beta_1 \text{CSR} + \beta_2 \text{CINT} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{Size} + e$$

Keterangan:

Penghindaran Pajak : Penghindaran Pajak diukur dengan proksi ETR.

α : Konstanta.

β : Koefisien Variabel.

CSR : *CSR Disclosure*

CINT : *Capital Intensity*

ROA : Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset*.

Size : Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma total aset.

e : *Error* (kesalahan pengganggu).

Dengan persamaan statistik di atas, hipotesis alternatif akan diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat sig dari hasil analisis lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima.

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012).

Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. oleh karena penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R²* karena lebih tepat untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen diterangkan oleh variabel –variabel independen.

3.5.3.2 Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2012). Uji

signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t berdasarkan pada kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.